**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 telah mencanangkan delapan tujuan global yang hendak dicapai negara-negara di dunia untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat. Program ini dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) dengan target pencapaian pada 2015. Adapun delapan sasaran MDGs tersebut yaitu: 1) menanggulangi kemiskinan; 2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) menurunkan angka kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) memerangi HIV/AIDS; 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; 8) membangun kemitraan global untuk pembangunan.[[1]](#footnote-1)

 Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat dunia dengan menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam pencapaian Pembangunan Millenium Development Goals 2015.[[2]](#footnote-2) Partisipasi Indonesia dalam Millennium Development Goals memaksa Indonesia untuk memegang komitmen terutama pada rakyat Indonesia dan masyarakat internasional khususnya untuk menjamin daya dukung lingkungan hidup dengan target memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang, Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 dan mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020.

Kelestarian lingkungan merupakan masalah paling besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Yang terjadi saat ini adalah, kecepatan kerusakan lingkungan lebih cepat dari pemulihannya. Bahkan, menjamin daya dukung lingkungan hidup merupakan salah satu sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah menunjukkan kecenderungan kemajuan yang baik namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015.

Keadaan dan kecenderungan posisi Indonesia saat ini menunujukkan adanya penurunan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daratan. Luas kawasan hutan tetap di Indonesia berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan tahun 2002 adalah 91,22 juta ha, tidak termasuk tiga provinsi yang masih dalam proses penunjukan (Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah). Berdasarkan penafsiran citra Landsat 7 ETM+ liputan tahun 1999/2000 kawasan hutan tetap seluruh Indonesia adalah seluas 110 juta ha dengan luas kawasan yang masih berhutan adalah 72 juta ha, sedangkan areal yang lain berupa non-hutan dan tidak ada data (tertutup awan). Berdasarkan data Statistik Kehutanan Indonesia tahun 1993 dan 2001, kondisi luas hutan Indonesia telah menyusut dari 130,1 juta ha menjadi 123,4 juta ha.[[3]](#footnote-3)

Dengan demikian, proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daratan di Indonesia menurun dari 67,68 persen pada 1993 menjadi 64,2 persen pada 2001. Dalam mencapai target MDGs, rasio kawasan tertutup pepohonan maupun hutan harus meningkat. Tetapi apa yang dicapai oleh negara Indonesia bukannya meningkat tetapi malah menurun. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus dalam tujuan MDGs yang ketujuh ini. Penyusutan luas hutan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain penjarahan hutan, kebakaran, perubahan (konversi) untuk kegiatan pembangunan lain di luar kehutanan seperti untuk pertambangan dan pembangunan jalan, permukiman, dan sebagainya.

Laju deforestasi selama kurun waktu 1985 sampai dengan 1997 untuk bioregion Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua adalah sekitar 1,8 juta ha/tahun. Terjadinya krisis ekonomi dan penerapan otonomi daerah diperkirakan meningkatkan laju deforestasi setelah tahun 1997. Penurunan luas hutan sekaligus juga merupakan penurunan fungsi dan peran ekologis hutan terhadap lingkungan yang akan berakibat pada terjadinya krisis air di masa depan.[[4]](#footnote-4)

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memberikan dampak amat besar kepada rakyat. Faktor ekonomi salah satu penyebab terjadinya peningkatan defortasi. Lajunya tingkat deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi dan tidak memikirkan akibat dari penggundulan hutan. Berdasarkan ringkasan status MDGs 2010, Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun kedepan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19 persen (2009). Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menurun dari 20,75 persen pada tahun 1993 menjadi 12,12 persen pada tahun 2009. Diperlukan perhatian khusus, untuk mencapai target MDG pada tahun 2015.[[5]](#footnote-5)

Walaupun secara keseluruhan keempat target dari menjamin daya dukung lingkungan hidup mengalami kemajuan, tetapi belum mencapai target yang ingin dicapai dalam MDGs. Bahkan di antara beberapa target tersebut mengalami kemunduran dan memerlukan perhatian khusus agar tercapai pada tahun 2015 seperti jumlah emisi karbon dioksida yang meningkat dari tahun ke tahun dan juga kawasan hutan di Indonesia yang semakin menipis.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program *MDGs* seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian *MDGs*. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. Tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.[[6]](#footnote-6)

 Oleh kareana itu Pada prakteknya diharapkan semua *stakeholders* dapat terlibat dalam mensukseskan MDGs di Indonesia salah satunya melalui kemitraan dengan sektor swasta. Hal ini diungkapkan oleh utusan khusus Presiden RI untuk MDGs, Mentri Kesehatan Nila Moeloek[[7]](#footnote-7) bahwa salah satu penekanan pada *United Nations Summit* terkait MDGs ialah pentingnya kerjasama dengan sektor privat. Maka dari itu, pemerintah memandang segala permasalahan dalam upaya percepatan pencapaian *Milenium Development Goals* MDGs agar ditempuh dengan langkah-langkah strategis, salah satunya adalah melalui kontribusi perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial (CSR) mereka. Mengingat pencapaian target-target MDGs pada tahun 2015 merupakan kepentingan nasional pemerintah yang telah ditandatangani dalam deklarasi millennium.

 Sektor privat merupakan salah satu elemen yang dapat berperan dalam upaya mensukseskan MDGs 2015 dan langkah yang paling nyata yang dapat dilakukan sektor privat dalam memenuhi tujuan MDGs adalah menjadikan MDGs sebagai bagian dari aksi Tanggung Jawab Sosial atau CSR suatu perusahaan. Ruang lingkup kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara keseluruhan sangat relevan dengan MDGs apalagi jika difokuskan pada target-targetnya, dimana kegiatan utama CSR diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam beberapa bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahpun telah berupaya melakukan harmonisasi CSR dengan MDGs namun pemerintah tidak akan mengatur CSR dari pihak swasta.[[8]](#footnote-8)

 Dewasa ini CSR telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas jangka panjang perusahaan, baik yang berskala multinasional maupun nasional terkait kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),[[9]](#footnote-9) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan semakin menegaskan pandangan negara mengenai pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Artinya aktivitas suatu perusahaan tidak lagi berorientasi dalam prinsip “*the business of bussines is bussines”.* Tapi, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah-masalah sosial di sekitarnya dengan mempertimbangkan aspek *sustainability*.[[10]](#footnote-10)

Beberapa perusahaan telah sukses menjalankan program CSR walau dengan sangat selektif dalam menjalankan programnya namun terlihat sangat menarik untuk dijadikan contoh atas sebuah keberhasilan program CSR, perusahaan seperti Aqua, Unilever, Sampoerna, Jarum, IBM, serta masih banyak yang lainnya, melakukannya dengan smart. Aktivitas CSR tidak sekadar di kawasan sekitar pabrik melainkan menyentuh kalangan yang lebih luas. Sampoerna dan Jarum dikenal konsisten dengan program beasiswa yang mutunya dijaga ketat juga terus meningkatkan prestasi bidang keolahragaan, sementara Aqua dan Unilever memperkenalkan nilai-nilai kejujuran, empati kepada sesama, dan pentingnya kebersihan dalam hidup sehari-hari. Dengan teknologinya, IBM membantu korban gempa dan tsunami di Aceh maupun Nias serta renovasi candi Borobudur.

CSR merupakan program penting suatu perusahaan dalam menciptakan citra positif melalui berbagai program sosial berkelanjutan seperti pelestarian lingkungan, pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Terutama adalah perusahaan-perusahaan yang bisnisnya berhubungan langsung dengan sumber daya alam, seperti PT Aqua Golden Missisipi, Danone Group yang bergerak dalam sektor industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan merupakan salah satu produsen yang terbesar di dunia telah ikut berkontribusi dalam membantu pemerintah melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk mendukung pencapaian MDGs Indonesia dengan berbagai program-program yang mengarah kepada beberapa target MDGs. Perusahaan memiliki komitmen ganda, di satu sisi menjaga keberlangsungan bisnis financial dan di sisi lain menjaga keberhasilan sosial lingkungannya. Komitmen perusahaan ini dalam mendukung pencapaian MDGs diapresiasi pemerintah melalui penghargaan MDGs Awards tahun 2009, 2010, 1012. Dan penghargaan Gold dari GKPM Awards 2013 (Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat) untuk kategori Program IFS (Integrated Farming System).[[11]](#footnote-11)

Menyebut kata “Aqua” bagi masyarakat Indonesia adalah menyebut produk air minum dalam kemasan (AMDK) apapun, tanpa memandang nama merek sebenarnya. Berbagai merk kemasan air minum di Indonesia belum mampu menggeser kuatnya branding dari aqua. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di dunia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Perusahaan telah berdiri selama hampir 40 tahun dan selama itu pula pihak perusahaan sangat bergantung pada sumber daya air sebagai bahan baku utamanya. Ketersediaan air untuk keberlangsungan usaha perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sumber air yang tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang tinggal dalam radius tertentu di sekitarnya yang merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri. Perusahaan menyadari pentingnya keseimbangan antara sumber air, perusahaan dan masyarakat di lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan MDGs.

Namun, tidak serta merta suatu perusahaan terlibat dalam praktik CSR tanpa terdorong oleh pertimbangan-pertimbangan ataupun kepentingan tertentu. Mengingat bahwa pelaksanaan program CSR dapat memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Tugas utama korporasi adalah mencari keuntungan sedangkan CSR berarti mengambil sebagian keuntungan dari perusahaan, walaupun di sisi lain CSR dianggap sebagai cara meningkatkan nilai perusahaan dalam kompetisi.[[12]](#footnote-12) Sehingga dari sini dapat diamati tujuan ataupun motivasi suatu perusahaan memilih terlibat atau tidak dalam praktik CSR baik kerana alasan sosial, politis, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Khusunya dalam hal ini praktik CSR untuk mendukung pencapaian target MDGs Indonesia. Begitu juga dengan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam *public private partnership* dalam pencapaian MDGs ini baik dari pemerintah maupun korporasi.

 Maka dalam hal ini keterlibatan perusahaan multinasional PT Aqua Golden Missisipi, Danone Group dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia melalui program CSR menjadi strategi bisnis perusahaan agar tercapai kepentingan dan tujuan dalam mensejahterakan rakyat.

 Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkenaan mengenai kontribusi sektor privat dalam hal ini Perusahaan Multinasional (MNCs) dalam pencapain Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 di Indonesia yang dituangkan dalam judul:

**“KONTRIBUSI PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNCs) DALAM PENCAPAIAN TUJUAN MILENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) 2015 DI INDONESIA (ANALISIS PADA PT AQUA GOLDEN MISSISIPI, DANONE GROUP) ”.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi PT. AGM melalui program CSR nya dalam Pencapain Target Tujuan Pembangunan MDGs 2015 di Indonesia?
2. Bagaiamana implementasi program CSR PT Aqua Golden Missisipi dalam Pencapaian Target Tujuan Pembangunan MDGs 2015 di Indonesia?
3. Bagaimana dampak implementasi program CSR PT Aqua Golden Missisipi terhadap Pencapaian Target Tujuan Pembangunan MDGs 2015 di Indonesia?
	* 1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat cukup luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi permasalah dengan menitik beratkan pada Implementasi Program ke 7 MDGS yaitu Pelestarian Lingkungan hidup melalui CSR PT Aqua Golden Missisipi, Danone Group di Indonesia.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah proses penganalisisan permasalahan tersebut yang berdasarkan pada Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah, maka penulis merumuskan permasalahn sebagai berikut: **“Sejauh mana Implementasi MDGs Program Pelestarian Lingkungan Hidup PT Aqua Golden Missisipi melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) ?”**

* 1. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**
		1. **Tujuan Penelitian**

1.Untuk Mengetahui Kontribusi Perusahaan Multinasional dalam Pencapaian Target Tujuan Pembangunan MDGs 2015 di Indonesia.

1. Untuk mengetahui kontribusi apa saja yang dilakukan PT Aqua Golden Missisipi melalui CSR dalam Pencapaian Target Tujuan Pembangunan MDGs 2015 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak kontribusi PT Aqua Golden Missisipi melalui CSR terhadap Target Tujuan Pembangunan MDGs 2015 di Indonesia.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**

1.Sebagai bahan informasi dalam pengembangan teori dan praktek mengenai sistem kerjasama internasional, terutama dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia.

1. Sebagai masukan bagi perkembangan dunia pendidikan, serta sebagai rujukan / referensi dimana kajian ini merupakan bagian dari kajian Hubungan Internasional yang bukan hanya berfokus kepada isyu-isyu mengenai politik global, ekonomi, dan hal lainnya.
2. Hasil penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian program strata satu (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
	1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
		1. **Kerangka Teoritis**

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori-teori dari para pakar terkait dengan hal-hal yang menyangkut skripsi penulis. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada.

Dewasa ini, Hubungan Internasional telah memasuki ruang lingkup pembahasan yang luas, yang mana menitik beratkan pada sifat hubungan formal yang melewati batas-batas negara meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam Hubungan Internasional, terjadi suatu interaksi yang dilakukan oleh para aktor, baik itu government, *non-government* atau bahkan aktor diluar keduanya.

Menurut **T. May Rudy** dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global” menjelaskan bahwa:

**Ruang lingkup yang dikaji oleh Hubungan Internasional menjadi lebih luas dengan mencakup pengkajian mengenai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya). Batasannya adalah bahwa Hubungan Internasional mengkaji hal-hal atau aspek-aspek tersebut dari segi keterhubungan global (global connections), yang non-domestik, yang melintasi batas wilayah masing-masing entitas negara.**[[13]](#footnote-13)

Pengertian Hubungan Internasional menurut **K.J. Holsti** yang diterjemahkan oleh **Wawan Juanda** dalam buku “*Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*” adalah sebagai berikut:

**Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi lembaga perdagangan internasional dan perkembangan nilai dan etika internasional.[[14]](#footnote-14)**

Kepentingan Nasional menurut **Hans J. Morgenthau** dalam buku “Ilmu Hubungan Internasinal: Disiplin dan Metodologi” karya **Mochtar Mas’oed**, adalah sebagai berikut:

**Kepentingan Nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang biasa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atau negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini biasa diciptakan melalui teknik paksaan atau kerjasama. Kepentingan Nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan nasional suatu negara bangsa lain, harus diidentifikasi dalam pengertian yang cocok dengan bangsa-bangsa lain**.[[15]](#footnote-15)

Setiap negara memiliki tujuan dan kepentingan nasional yang mana untuk mensejahterakan rakyatnya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanlah hubungan, interaksi serta kerjasama dengan berbagai aktor. Seperti misi yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu mengenai Pembangunan Millenium Development Goals yang mana tujuan program pembangunan ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia. Dimana sektor private dalam hal ini Perusahaan Multinasional turut serta dalam mewujudkannya.

**Siagian** (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).” Sedangkan **Ginanjar Kartasasmita** (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan kea rah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”[[16]](#footnote-16)

**Portes** (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut **Deddy T. Tickson** (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.[[17]](#footnote-17)

 Perusahaan Multinational Coorporation (MNC) merupakan sebuah perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara tetapi kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang. Sebuah perusahaan akan menjadi perusahaan multinasional berdasarkan keuntungan untuk mendirikan produksi dan kegiatan lainnya di lokasi asing. Perusahaan mengglobalisasikan kegiatan mereka baik untuk memasok pasar dalam negeri-negara mereka, dan untuk melayani pasar luar negeri secara langsung. Menjaga kegiatan asing dalam struktur perusahaan memungkinkan perusahaan menghindari biya yang melekat oleh perantara, dengan entitas yang terpisah sambil memnfaatkan pengetahuan perusahaan mereka sendiri.[[18]](#footnote-18)

Pembangunan dalam pencapaian MDGs dilakukan oleh PT Aqua Golden Missisipi, Danone Group dilakuka melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) Penjelasan tentang CSR bersifat sukarela (voluntary), CSR dapat bersifat sukarela atau wajib. CSR bersifat sukarela setidaknya disebabkan empat hal yaitu tujuan perusahaan mencari keuntungan, CSR merupakan kewajiban moral, pelaksanaan CSR bertentangan dengan hak kepemilikan privat dan tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dalam bisnis. Sedangkan CSR adalah aktivitas bisnis yang diwajibkan disebabkan korporasi seharusnya memperhatikan kepentingan sosial selain mencari keuntungan.[[19]](#footnote-19)

Menurut pemikiran **E Merric Dodd** memandang CSR wajib dilakukan suatu perusahaan, bahwa korporasi bekerja tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum dan kesejahteraan bangsa, yang selanjutnya dikenal dengan istilah *stakeholder*. **Dodd**  kemudian melahirkan pemikiran *stakeholder theory*. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan, apabila direksi korporasi hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi kepentingan pemegang saham, maka kemungkinan besar bisnis akan cenderung menyimpang. Perusahaan akan melakukan eksploitasi terhadap buruh dan menekan konsumen serta rekanan bisnis, untuk itu tujuan mencari keuntungan oleh korporasi harus diperluas juga kepada pemenuhan kepentingan *stakeholder*.[[20]](#footnote-20)

**Tanggung jawab sosial perusahaan**, diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UUPT tersebut Tanggung jawab sosial dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

**Kotler dan Lee** (2005) menyatakan

”***corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resources*”.[[21]](#footnote-21)**

Lebih lanjut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menjelaskan :

**“*corporate social responsibility as business‘ commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community, and society at large to improve their quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large****”[[22]](#footnote-22)*

**Carrol** (1999) memandang bahwa merupakan suatu konsekuensi bahwa lembaga atau organisasi tidak hanya beraktivitas dalam dimensi ekonomi tetapi juga dimensi lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya ekonomi, tetapi juga tanggung jawab hukum, etika, dan filantropis atau dikenal model empat bagian CSR. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:[[23]](#footnote-23)

1. Tanggung jawab ekonomi. (*make a profit*). Motif utama perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan. keuntungan adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomis sebagai prasyarat untuk terus hidup (survive) dan berkembang.

2. Tanggung jawab hukum. (*Obey the law*). Perusahaan harus mematuhi hukum. Dalam proses mencari keuntungan, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi acuan bagi perilaku organisasi perusahaan. (*Be ethical*.)

4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus mendapatkan keuntungan, mematuhi hukum, dan perilaku etis, perusahaan dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup untuk semua. (*be good corporate citizen*.). Pemilik dan karyawan yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu untuk perusahaan dan masyarakat.

 **John Elkington** mengemukakan CSR ke dalam tiga fokus: **3P (*People, Planet, dan Profit*)**. Perusahaan yang baik tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan sosial (people). CSR adalah kesadaran, etika, dan kepedulian dari perusahaan yang didasarkan pada tiga prinsip dasar yang dikenal sebagai *triple bottom line*, yaitu 3P.[[24]](#footnote-24)

***Planet***. Perusahaan peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Beberapa Program CSR yang bertumpu pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan, penyediaan air (sanitasi), perbaikan perumahan, ***People***. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR, seperti beasiswa bagi mahasiswa di sekitar perusahaan, pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. ***Profit***. Orientasi utama dari setiap kegiatan usaha jelas adalah mencari keuntungan ekonomi untuk mendapatkan tambahan pendapatan yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

Sehubung dengan hal tersebut dalam hal ini suatu perusahaan dalam berdirinya tentu haruslah memperhatikan lingkungan tempat perusahaan itu berdiri. Dewasa ini Lingkungan merupakan salah satu isu hubungan internasional yang kini mendapatkan posisi banyak dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini disebabkan dampak yang diberikan oleh isu ini sangat mengancam kelangsungan hidup bumi dan isinya. Sehingga diperlukan adanya tindakan tepat dalam menangani masalah lingkungan ini.

Banyak ahli lingkungan yang melihat paradigma penyelesaian masalah lingkungan selama ini sangat *antroposentris*. *Antroposentris* yakni sebuah pandangan hidup yang menganggap alam diciptakan hanya untuk kepentingan manusia dan bersifat eksploitatif, dengan melihat adanya dualisme antara lingkungan dan manusia. Green politics dengan dua konsep utamanya; keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*) serta desentralisasi tata kelola lingkungan, menjadi jalan alternatif bagi penyelesaian masalah lingkungan yang biasanya bertumpu pada konsep pembangunan keberlanjutan (*sustainable development)* dan pembentukan rezim lingkungan internasional yang terbukti belum dapat menyelesaikan problem lingkungan dunia.

*Green politics* menawarkan konsep desentralisasi sebagai implementasi kontrol yang lebih baik dalam mengatasi kontrol level global dapat lebih efektif dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil, yakni skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi tehadap alam sekitar dalam kehidupn mereka. Dengan konsep itu, selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan *green politics* bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan prolingkungan. Mengutip **Charlene Spretnak** dalam *Spiritual Dimension of Green Politics*, yang mengatakan:

**Betapa pentingnya mengembangkan green politics (politik hijau); gerakan politik sadar ekologi. Oleh karena itulah kebijakankebijakan sosial-poltik-ekonomi kita sudah saatnya mempertimbangkan soal lingkungan hidup.[[25]](#footnote-25)**

 Para pemikir *Green Politics*, **Eckersley**, **Goodin** dan **Dobson** yang biasa disebut sebagai kelompok *Green Politics* mengkritik eksploitasi manusia terhadap lingkungan, alasannya dengan mengatakan: Pada dasarnya pemikiran ini adalah menekankan pada pentingnya suatu paham serta upaya yang berlandaskan pada

***ecocentrism*, yaitu suatu bentuk penolakan atas pandangan anthropocentris atas dunia. Yang terpenting adalah keseimbangan antara alam dan manusia. Pada saat keseimbangan tadi tidak lagi bersifat seimbang, maka pada saat itulah kerusakan akan terjadi, istilahnya adalah *Katastrophe*, atau bencana.[[26]](#footnote-26)**

 Gerakan lingkungan adalah istiah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk aksi kesadaran manusia yang peduli terhadap kerusakan lingkungan, serta berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang terancam akibat kerusakan lingkungan. Dua terminologi yang erat kaitannya dengan gerakan lingkungan adalah konservasi dan “gerakan hijau” (*Green movement).*

**Aditjondro**, mendefinisikan politik lingkungan sebagai:

**Interaksi kekuatan yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya alam tertentu, termasuk pengubahan ekosistem tertentu yang bisa berakibat buruk bagi kelompok masyarakat tertentu yang kehidupannya tergantung pada sumber daya alam tersebut serta pelestarian ekosistemnya. [[27]](#footnote-27)**

 Berdasarkan definisi di atas sebuah interaksi yang dilakukan oleh manusia menghasilkan sebuah keputusan yang mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alama tertentu, dan keputusan tersebut juga mempengaruhi pengubahan sebuah sistem dan bisa berakibat fatal jika tidak memperhatikan kelestarian ekosistem tersebut, dimana yang sebagian kelas sosial masyarakat sangat bergangtung ekosistem tersebut.

Dari uraian diatas beberapa asumsi yang bisa saya simpulkan yang berhubungan dengan identifikasi masalah yaitu;

1. PBB telah mencanangkan suatu program pembangunan Millenium yang dinamakan MDGs, dalam pencapaian target pembangunan MDGs bukan hanya pemerintah saja yang memiliki peran untuk mewujudkannya akan tetapi sektor private dalam hal ini perusahaan multinasional turut serta dalam target pencapaian MDGs 2015 di Indonesia melalui program tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR). Yang mana program CSR sendiri telah selaras dengan target-target yang ada dalam MDGs.
2. PT. Aqua Golden Missisipi, Danone Group telah berkontribusi dalam target pencapaian tujuan MDGs 2015 di Indonesia melalui beberapa program tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR) yang mana bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khusunya yang berada di sekitar perusahaan.
3. Dalam pelaksanaan CSR terdapat beberapa dampak yng dapat dirasakan bagi masyarakat di sekitar perusahaan PT. Aqua Golden Missisipi, Danone Group. Seperti adanya pembangunan Infrastruktur jalan, perbaikan Sanitasi total berbasis Masyarakat dan Sekolah, dan program kampung sehat.
	* 1. **Hipotesis**

**“Jika AGM dalam Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals 2015 melalui CSR Program WASH dapat dilakukan dengan efektif, maka Pembangunan MDGs 2015 sektor Lingkungan di Indonesia akan tercapai dengan baik yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya”**

* + 1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Untuk lebih memperjelas sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan juga hipotesis, maka operasionalisasi variable dituangkan ke dalam tabel di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)**  | **Verifikasi (Analisis)** |
| Jika PT Aqua Golden Missisipi, Danone Group dalam Pencapaian Target Pembanguan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 di Indonesia melalui program CSR dapat diimplementasikan dengan optimal | Adanya Program PT. Aqua Golden Missisipi dalam pencapain Target MDGs 2015 sektor Lingkungan melalui CSR. Program tersebut meliputi:Program WASH (*Water Access, Sanitation, Hygiene Program*) dan *Empirovement.*  | Data dan fakta mengenai Laporan Keberlanjutan Aqua group ( Sustainability Report) 2011-2012 CSR PT Aqua Golden Missisipi, (Sumber : www.Aqua.com) |
| Maka Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 di Indonesia akan tercapai dengan baik ya ng ditandai dengan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat serta Lingkungannya. | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang berada disekitar Perusahaan, dengan adanya perbaikan dari segi infrastruktur seperti pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat seperti pembangunan sarana air bersih | Data & fakta mengenai Pembangunan Sarana Air bersih Di NTT (Sumber: www.Aqua.com) |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Perusahaan Multinasional (MNCs): PT. Aqua Golden Missisipi, Danone Group**

**Pemerintah Indonesia**

**Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

**Program WASH (*Water Access, Sanitation, Hygiene Program*) dan *Empowerment Program.***

**Target : Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.**

**Misi MDGs PBB**

**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan sekitar Perusahaan sebagai pencapai Pembangunan Millenium Development Goals 2015 di Indonesia.**

* 1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. **Tingkat Analisis**

Ada tiga kelompok antara unit analisa dan unit eksplanasi, yaitu analisa reduksionis, analisa korelasionis dan analisa induksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat analisa Reduksionis dimana unit eksplanasi pada tingkatan yang lebih rendah dari pada unit analisanya, yaitu kontribusi perusahaan multinasional (MNCs) dalam mencapai tujuan pembangunan MDGs di Indonesia pada sektor lingkungan.

* + 1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah:

1. *Metode Deskriptif Analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengklarifikasi serta menganalisis fenomena atau gejala actual yang berkembang dewasa ini yang ditunjang oleh beberapa pendekatan dengan maksud untuk memudahkan cara memandang sebagai analisis dan wawasan tantangan permasalahan yang tengah terjadi.
2. *Metode Historis Analisis*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membahas, menganalisis dan mengkaitkan kejadian masa lampau yang berkaitan dengan masalah yang tengah dihadapi atau bahkan terhadap hal-hal yang dapat terjadi di masa yang akan datang, yang kesimpulan pada masa lalunya dikomparasikan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini.
	* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. studi kepustakaan (*library Research),*

yaitu penelusuran data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, baik bersifat empiris maupun teori, berupa buku referensi, dokumen pemerintah, media cetak dan elektronik, dan bahan lainnya yang dianggap relevan dengan kajian penelitian yang sedang dibahas.

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan objek tujuan memperoleh data primer yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.

1. Wawancara (Interview)

Interview atau yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Teknik wawancara disini digunakan untuk menggali tentang program-program perusahaan AQUA yang ditujukan untuk masyarakat dan pendapat masyarakat mengenai kontribusi perusahaan.

1. Dokumentasi

 Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan-laporan mengenai program-program yang dilakukan perusahaan dan laporan mengenai tenaga kerja yang terserap.

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
		1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil lokasi dibeberapa tempat yang dianggap relevan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap serta akurat mengenai pembahasan yang diteliti. Adapun lokasi-lokasi tersebut antara lain:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Dalam 11 No. 17D Bandung.

1. Perpustakaan Cisral Universitas Padjajaran

Jl. Dipati Ukur No.46, Bandung, Jawa Barat.

1. Media Internet.
	* 1. **Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, terhitung dari bulan Desember 2015 hingga juni 2016.

* 1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan maslah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

 Bab II berisikan uraian variable bebas yaitu mengenai keikutsertaan Perusahaan Multinasional melalui CSR dalam pencapaian Target Pembangunan Millenium Development Goals 2015 di Indonesia.

**BAB III : OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab III berisikan tentang variable terikat mengenai pencapaian millennium goals sector lingkungan dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia..

 **BAB IV : VERIVIKASI DATA**

Bab ini akan membahas, menguraikan, serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V : KESIMPULAN**

Bab yang merupakan penutup dari penelitian yang perlu memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dipandang perlu, daftar kepustakan dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi yang menjadi fokus kajian

1. Millenium Development Goals (MDGs) dalam <http://www.academia.edu//MILLENIUM_DEVELOPMENT_GOALS_MDGS>. di akses pada 12 februari 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Indonesia Ikut serta dalam pencapaian MDGs 2015 dalam <http://sekretariatmdgs.or.id/> di akses pada 9 februari 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tim Penyusun Laporan MDGs Indonesia. (2004). *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan*

*Pembangunan Milenium Indonesia.* Jakarta: Bappenas hal.80 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid hal. 80 [↑](#footnote-ref-4)
5. Tim Penyusun MDGs Indonesia. (2010). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium*

*di Indonesia 2010.* Jakarta: Bappenas hal.7 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Sasaran Pembangunan Milenium*. (n.d.). from

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium> di akses pada 7 maret 2016 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kompas.Com, News, CSR Diimbau Ikut Percepat Pencapaian MDGs, 29 September 2010 diakses dari <http://nasional.kompas.com> pada 9 februari 2016 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pemerintah Harmonisasi CSR dan MDGs, dalam <http://www.bappenas.go.id/pencapaian-tujuan-pembangunan-milleniumdi-indonesia2011__2013.htm> di akses pada 9 februari 2016 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ketentuan mengenai CSR dalam UUPT di atur pada pasal 74 ayat 1 yang berbunyi *Perseroan*

*yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam*

*wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.* Dan aturan yang lebih tegas juga

telah ada dalam pasal 15 huruf b UUPM yang menyatakan bahwa *setiap penanam modal*

*berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan* . [↑](#footnote-ref-9)
10. Michael Hopkins, 2007, Corporate Social Responsibility & International Development: Is Business Solution?, Londing: Earthcan, hal 113 [↑](#footnote-ref-10)
11. Aqua, Indonesia MDGs Awards (IMA) 2012, diakses dari <http://www.aqua.com/kabar_aqua/berita-perusahaan/indonesia-mdg-awards-ima>. di akses pada 10 februari 2016 [↑](#footnote-ref-11)
12. Michael Hopkins, 2007, Op.cithal 113 [↑](#footnote-ref-12)
13. T. May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global* (Bandung: Refika Aditama: 2003), hlm 2. [↑](#footnote-ref-13)
14. K.J. Holsti, Politik Internasional: *Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Djuanda)

 (Bandung: Bina cipta, 1987), hlm.26. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 140. [↑](#footnote-ref-15)
16. Samsiah Badruddin, Pengertian Pembangunan: teori dan indikator pembangunan dalam <http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> diakses 15 februari 2016 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-17)
18. Michael J. Carbaugh, International Economics, South-Western College Publishing, Cincinnati, 2000 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mukti Fajar, 2013, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, swasta nasional dan BUMN di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 43. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-20)
21. Kotler dan Lee (2005) dalam Isa Wahyudi, & Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Prinsip Pengturan dan Implementasi*, Malang: Setara Press, hal 35 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-22)
23. Archie B Carrol & Ann K. Buchholtz , 1999, *Bu siness and Society: Ethics and Stakeholder*

*Management 4 edition*, Mason: South-Western Cengage Learning, hal 33-38 [↑](#footnote-ref-23)
24. John Elkington, 1998, *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business,* Gabriola Island, BC ; New Society Publishers, hal 69 [↑](#footnote-ref-24)
25. Stephan Elkins, 1990, “The Politics of Mystical Ecologi”, Telos 82 Journal, hal. 52. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mattew Patterson, 2001,“Green Politics”, dalam Burchill, Schoot, and all, “Theories of International Relation , 2 nd Edition, Palgrave Macmillan: New York, hal 277. [↑](#footnote-ref-26)
27. George Junus Aditjondro, 2003, “Pola-pola Gerakan Lingkungan”, Refleksi untuk Menyelematkan lingkungan dari Ekspansi Modal. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal. 63. [↑](#footnote-ref-27)